

KEGAGALAN TATA KELOLA DAN DUGAAN KORUPSI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI BADAN GIZI NASIONAL

Andhini Sekar Putri¹, Naomira Gadieza Putri², Saly Nur Najataki³, Ivan Darmawan⁴
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Sumedang
E-mail: *andhini24001@mail.unpad.ac.id¹, naomira24001@mail.unpad.ac.id²,
saly24001@mail.unpad.ac.id³, ivandarmawan@unpad.ac.id⁴

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terungkap awal Juni 2026, ditandai pencopotan tiga pimpinan BGN, penggeledahan kantor, dan penetapan enam tersangka oleh Kejaksaan Agung. Melalui analisis isi dokumen resmi, peliputan media, dan *institutional failure analysis*, artikel ini mengkaji kelemahan tata kelola yang memungkinkan penyimpangan, aktor yang terlibat, serta dampaknya terhadap efektivitas program gizi nasional. Temuan awal menunjukkan penyimpangan terjadi melalui dua klaster utama: manipulasi portal verifikasi mitra yang melibatkan yayasan terafiliasi, dan penggelembungan harga pengadaan, termasuk pengadaan motor listrik senilai lebih dari satu triliun rupiah. Artikel ini berargumen bahwa akar masalah terletak pada lemahnya institusionalisasi lembaga baru yang diberi kewenangan dan anggaran besar tanpa penguatan pengawasan internal dan eksternal yang memadai. Implikasi kebijakan meliputi reformasi tata kelola pengadaan, penguatan unit kepatuhan internal, dan perluasan pengawasan oleh DPR, BPK, dan masyarakat sipil.

Kata kunci

Badan Gizi Nasional; Makan Bergizi Gratis; korupsi pengadaan; tata kelola lembaga publik; institutional failure analysis.

ABSTRACT

This article examines the alleged corruption in Indonesia's National Nutrition Agency (BGN) in administering the Free Nutritious Meal Program (MBG), which came to light in early June 2026 following the President's dismissal of three top BGN leaders, a raid on BGN headquarters, and six suspects named by the Attorney General's Office. Using document content analysis, media coverage, and institutional failure analysis, this article examines the governance weaknesses that enabled the misconduct, the key actors involved, and its impact on the national nutrition program's effectiveness. Preliminary findings show the misconduct occurred through two main clusters: manipulation of the partner verification portal involving affiliated foundations, and price inflation in procurement, including electric motorcycle procurement worth over one trillion rupiah. The article argues the root cause lies in weak institutionalization of a newly established agency granted vast authority and budget without commensurate strengthening of internal and external oversight. Policy implications include procurement governance reform, strengthened internal compliance units, and expanded oversight by Parliament, the Supreme Audit Agency, and civil society.

Keywords

National Nutrition Agency; Free Nutritious Meal Program; procurement corruption; public institution governance; institutional failure analysis.

1. PENDAHULUAN

Badan Gizi Nasional (BGN) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang diundangkan pada 15 Agustus 2024, tepat pada penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lembaga ini didudukkan sebagai badan pemerintah yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan mandat utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional, termasuk menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo

Subianto. Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala BGN pertama pada 19 Agustus 2024, namun sejak awal berdirinya, desain kelembagaan BGN telah menuai sorotan dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil, mengingat tidak satu pun jajaran pimpinan utamanya memiliki latar belakang keilmuan gizi atau keamanan pangan, sementara pengaturan teknis pelaksanaan program baru diterbitkan hampir satu tahun setelah program berjalan, sebuah celah waktu yang kerap dipandang sebagai indikasi lemahnya kerangka tata kelola sejak tahap perencanaan.

Program MBG mulai berjalan pada 6 Januari 2025 dengan skala anggaran yang membesar secara drastis dalam waktu singkat, dari Rp85,27 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp268 triliun pada 2026, seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Skala pembiayaan yang sangat besar dan pertumbuhan anggaran yang cepat ini menjadi konteks penting untuk memahami kerentanan program terhadap penyimpangan, terlebih program ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang kini untuk pertama kalinya menjadi sasaran penegakan hukum tindak pidana korupsi. Variasi angka anggaran yang muncul di berbagai sumber resmi turut menggambarkan kompleksitas pengelolaan keuangan program ini, sekaligus menegaskan urgensi untuk menelusuri secara cermat bagaimana dana sebesar itu dikelola dan diawasi di lapangan.

Rangkaian peristiwa yang menjadi fokus kajian ini bermula pada pertengahan Mei 2026, ketika Presiden Prabowo menerima laporan dugaan korupsi di tubuh BGN yang bersumber dari hasil pemantauan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Status perkara kemudian meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan pada akhir Mei 2026, disusul pencopotan tiga pimpinan utama BGN oleh Presiden pada awal Juni 2026 dan penggeledahan kantor BGN oleh Kejaksaan Agung tidak lama setelahnya. Dalam rentang waktu kurang dari satu bulan, penetapan tersangka meluas dari kalangan internal pimpinan BGN kepada pihak swasta yang berperan sebagai vendor pengadaan maupun figur yang terafiliasi dengan yayasan tertentu, yang mengindikasikan adanya pola jaringan yang melibatkan aktor lintas sektor, baik dari unsur birokrasi maupun bisnis.

Berdasarkan latar institusional dan rangkaian peristiwa tersebut, kajian ini disusun untuk menelusuri tiga persoalan utama, yaitu mekanisme kelemahan tata kelola yang memungkinkan terjadinya dugaan penyimpangan di tubuh BGN, siapa saja aktor utama yang terlibat beserta pola jaringan di antara mereka, dan bagaimana dampak dari skandal ini terhadap efektivitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional, baik dari sisi operasional maupun kepercayaan publik. Kajian ini menjadi relevan bukan semata karena besarnya nilai anggaran negara yang dipertaruhkan, melainkan juga karena posisinya sebagai preseden penegakan hukum korupsi pertama yang menyasar sebuah Proyek Strategis Nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana program berskala besar dapat rentan terhadap penyimpangan apabila tidak disertai kerangka pengawasan dan akuntabilitas yang memadai sejak tahap perancangannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan sumber data sekunder. Data utama dikumpulkan dari empat kategori sumber. Pertama, rilis dan keterangan resmi Kejaksaan Agung, khususnya keterangan Direktur Penyidikan Jampidsus dan juru bicara terkait kronologi penetapan tersangka, modus operandi, dan dasar hukum yang digunakan. Kedua, peliputan media nasional arus utama, termasuk Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Detik, Antara, CNBC Indonesia, dan Bisnis.com, yang

digunakan untuk merekonstruksi kronologi peristiwa secara lebih rinci serta menangkap reaksi berbagai pemangku kepentingan. Ketiga, dokumen anggaran dan APBN, termasuk keterangan resmi Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa, untuk memetakan skala dan realisasi anggaran program MBG. Keempat, laporan dan kajian dari organisasi masyarakat sipil, seperti laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) berjudul “Ada Siapa di Balik MBG: Politik Patronase untuk Memperkuat Dukungan”, serta pernyataan publik dari peneliti *Transparency International Indonesia* dan *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS).

Metode analisis yang digunakan terdiri atas tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, analisis isi dokumen (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola pernyataan resmi, kategori tuduhan, dan dasar hukum yang dikenakan kepada para tersangka. Kedua, penelusuran aliran dana dan pemetaan mitra (*fund and partner tracing*), yang dalam konteks artikel ini dilakukan secara deskriptif berdasarkan keterangan penyidik mengenai dua klaster penyimpangan, yaitu klaster jual beli titik SPPG dan klaster pengadaan barang. Ketiga, pendekatan *institutional failure analysis* yang digunakan untuk menafsirkan akar struktural penyimpangan, dengan merujuk pada konsep *weak institutionalization*, *regulatory capture*, dan *information asymmetry* dalam literatur tata kelola sektor publik.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang penting untuk diakui secara jujur. Pertama, akses terhadap data primer, seperti dokumen pengadaan internal BGN, transkrip pemeriksaan, atau hasil audit BPKP, masih sangat terbatas karena proses hukum yang ditangani Kejaksaan Agung masih berjalan dan bersifat tertutup pada tahap penyidikan. Kedua, terdapat risiko bias pemberitaan media yang berpotensi memperbesar atau menyederhanakan aspek tertentu dari kasus ini, terutama klaim dari pihak tersangka melalui kuasa hukum yang belum sepenuhnya diverifikasi oleh penyidik, seperti tuduhan keterlibatan puluhan nama politisi yang disampaikan salah satu tersangka. Ketiga, nilai kerugian negara dalam kasus ini hingga naskah ini disusun masih dalam proses penghitungan oleh BPKP dan belum bersifat final, sehingga setiap angka yang dikutip dalam artikel ini harus dipahami sebagai estimasi sementara, bukan angka resmi yang berkekuatan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Hukum, Aktor, dan Jaringan

Tindakan administratif dan hukum dalam kasus ini berjalan hampir beriringan. Pencopotan tiga pimpinan utama BGN oleh Presiden pada 2 Juni 2026 dilakukan satu hari sebelum penggeledahan dan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung, yang menunjukkan adanya koordinasi informasi antara penegak hukum dan Istana sebelum tindakan publik dilakukan. Presiden Prabowo, dalam sebuah acara di Sentul pada hari yang sama dengan penggeledahan, menyampaikan pernyataan yang relevan untuk dicatat: “Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa narasi resmi pemerintah menempatkan persoalan ini sebagai kegagalan individu kepemimpinan, ketimbang kegagalan desain kelembagaan yang lebih mendasar, sebuah perbedaan penekanan yang akan dibahas lebih jauh pada bagian analisis.

Total terdapat enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka hingga 18 Juni 2026. Tiga orang pertama merupakan eks pimpinan struktural BGN, yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Berdasarkan keterangan penyidik, Sony Sonjaya diduga merupakan aktor yang paling bertanggung jawab atas proses verifikasi titik SPPG, sementara Dadan Hindayana diduga memberikan akses dan menerima aliran dana dari

mitra, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak eksternal, yaitu Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai orang kepercayaan Sony dalam mengintervensi sistem verifikasi portal mitra, Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal yang menjadi vendor pengadaan motor listrik, dan Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan *Indonesia Food Security Review* yang diduga berperan dalam jual beli titik SPPG.

Pola jaringan yang muncul dari keterangan penyidik menunjukkan keterlibatan setidaknya tiga lingkaran aktor, yaitu lingkaran pejabat internal BGN yang memegang kewenangan verifikasi dan persetujuan, lingkaran pengusaha atau vendor yang menyediakan barang dan jasa untuk program MBG, dan lingkaran yayasan afiliasi yang berfungsi sebagai kendaraan formal untuk mengakses dana program di tingkat satuan pelayanan. Laporan ICW berjudul “Ada Siapa di Balik MBG”, yang menelaah 102 yayasan mitra BGN, menemukan bahwa 28 yayasan atau sekitar 27,45 persen di antaranya memiliki afiliasi politik formal, dengan Partai Gerindra menyumbang afiliasi terbanyak. Penting untuk ditegaskan bahwa ICW sendiri menyatakan temuan afiliasi politik ini tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum, namun temuan tersebut memperkuat gambaran bahwa jaringan mitra BGN dibangun di atas pertimbangan kedekatan politik dan kelembagaan, bukan semata kapasitas teknis dalam penyediaan layanan gizi.

3.2 Mekanisme Penyimpangan Pengadaan

Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, terdapat dua klaster utama modus penyimpangan dalam kasus ini. Klaster pertama berkaitan dengan jual beli atau pengaturan titik SPPG. Dalam skema normal, mitra penyelenggara SPPG seharusnya berasal dari yayasan yang memenuhi syarat teknis dan administratif melalui proses verifikasi pada portal mitra BGN. Namun dalam praktiknya, sejumlah yayasan yang ditunjuk justru terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN dan tidak memenuhi syarat, tetapi tetap diloloskan melalui pengaturan khusus pada tahap verifikasi, yang dalam keterangan penyidik disebut sebagai pemberian “atensi khusus”. Yayasan yang diloloskan dengan cara ini diduga menerima insentif operasional senilai miliaran rupiah setiap harinya, dan sebagai kompensasi, sebagian dana tersebut disetorkan kembali kepada pejabat yang memberikan akses.

Klaster kedua berkaitan dengan penggelembungan harga atau *mark up* dalam pengadaan barang. Modusnya melibatkan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan. Kasus paling besar yang terungkap adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik bermerek Emmo dengan total nilai pengadaan sekitar Rp1,03 triliun, yang dibayarkan kepada PT Yasa Artha Trimanunggal. Menurut keterangan Direktur Penyidikan Jampidsus Syarif Sulaeman Nahdi, perusahaan ini diduga belum memiliki jaringan dealer dan bengkel aktif di Indonesia pada saat pengadaan dilakukan, sementara pembayaran 100 persen telah dicairkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang diduga dimanipulasi, padahal sebagian unit motor pada saat itu masih dalam proses perakitan. Selain motor listrik, penyidik juga mengidentifikasi pengadaan bermasalah untuk 32.000 pasang sepatu, sekitar 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.3 Dampak Anggaran dan Operasional

Hingga artikel ini ditulis, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa nilai kerugian negara dalam kasus ini masih dalam proses penghitungan oleh BPKP dan belum bersifat

final. Sejumlah pemberitaan menyebut estimasi awal yang berkisar dari ratusan miliar hingga lebih dari satu triliun rupiah, dengan nilai pengadaan motor listrik saja diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun. Beberapa media bahkan menyebut potensi nilai keseluruhan proyek yang bermasalah melampaui Rp4 triliun, namun angka ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh penegak hukum dan harus diperlakukan sebagai estimasi spekulatif, bukan fakta yang sudah terverifikasi. Penyidikan juga masih bergerak dinamis, sebagaimana terlihat dari pengakuan tersangka Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya yang menyebut adanya puluhan nama politisi dan penyelenggara negara yang diduga meminta titik SPPG, serta dugaan klaster baru terkait pengadaan perangkat *closed circuit television* dan alat pemindai sidik jari senilai lebih dari Rp300 miliar. Klaim-klaim ini penting dicatat sebagai bagian dari dinamika kasus, namun belum diverifikasi penyidik dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri.

Dari sisi operasional, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Program MBG tetap berjalan dan tidak dihentikan akibat kasus ini. Namun, koalisi masyarakat sipil yang menamakan diri MBG Watch melakukan aksi simbolis menyegel kantor BGN pada 10 Juni 2026 sambil menuntut moratorium total dan audit menyeluruh terhadap penyelenggaraan program, dengan memberikan ultimatum 30 hari kepada Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, untuk menunjukkan perbaikan nyata. Risiko gangguan operasional yang paling nyata bukan terletak pada penghentian distribusi makanan secara fisik, melainkan pada potensi tergerusnya kepercayaan publik terhadap program ini, yang pada gilirannya dapat memengaruhi legitimasi politik atas kelanjutan anggaran besar yang telah dialokasikan untuk tahun-tahun mendatang.

3.4 Analisis Interpretasi Penyebab Struktural

Analisis ini menunjukkan bahwa skandal BGN tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya sebagai kegagalan moral individu, sebagaimana implisit dalam narasi resmi yang menekankan persoalan kepemimpinan. Penyimpangan ini lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari desain kelembagaan yang rentan, sebuah pola yang dalam literatur tata kelola publik dikenal sebagai *weak institutionalization*. BGN adalah lembaga yang baru dibentuk pada akhir 2024, namun dalam waktu kurang dari satu tahun langsung diberi kewenangan mengelola anggaran puluhan triliun rupiah yang kemudian melonjak menjadi ratusan triliun rupiah pada tahun kedua operasinya. Lonjakan kewenangan dan sumber daya yang sangat cepat ini tidak diiringi penguatan proporsional pada sistem kontrol internal, sebagaimana terlihat dari fakta bahwa Peraturan Presiden yang mengatur tata kelola pelaksanaan MBG secara rinci baru terbit pada November 2025, hampir satu tahun setelah program berjalan. Dalam kondisi semacam ini, kecepatan penyaluran dana kepada penerima manfaat menjadi prioritas politik yang mengalahkan kehati-hatian prosedural, sehingga membuka ruang bagi aktor yang memiliki akses informal terhadap proses verifikasi untuk mengambil keuntungan.

Kelemahan kedua terletak pada arsitektur pengadaan digital dan proses verifikasi mitra. Portal pendaftaran mitra BGN dirancang untuk memverifikasi kelayakan yayasan calon penyelenggara SPPG secara administratif, namun berdasarkan keterangan penyidik, sistem ini dapat diintervensi secara manual oleh pihak yang memiliki akses, sebagaimana dilakukan tersangka Asep Yusuf Somantri yang diduga mampu mengetahui titik yang masih kosong, membatalkan status pendaftaran yang sudah disetujui pihak lain, dan memfasilitasi pendaftaran baru meskipun portal secara resmi telah ditutup. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi proses pengadaan, yang seharusnya mengurangi diskresi manusia dan dengan demikian mengurangi ruang korupsi, justru gagal mencapai tujuannya ketika tidak diiringi dengan pemisahan kewenangan yang jelas antara pihak

yang merancang sistem, pihak yang mengoperasikan sistem, dan pihak yang mengawasi sistem tersebut.

Ketiga, struktur insentif yang berkembang di sekitar program ini mendorong terjadinya *capture*, yaitu kondisi ketika kebijakan publik justru diarahkan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan, bukan kepentingan publik secara luas. Temuan ICW bahwa lebih dari seperempat yayasan mitra BGN memiliki afiliasi politik formal, ditambah dengan keterangan penyidik bahwa yayasan yang terafiliasi pejabat justru mendapat “atensi khusus” dalam proses verifikasi, menggambarkan bagaimana jaringan kedekatan informal dapat mengalahkan kriteria teknis dalam seleksi mitra. Pada sisi pengadaan barang, pola serupa terlihat dari kasus PT Yasa Artha Trimanunggal yang berhasil memenangkan kontrak senilai lebih dari satu triliun rupiah meskipun diduga belum memiliki infrastruktur dealer dan layanan purnajual yang memadai, sebuah anomali yang semestinya tertangkap apabila proses uji kelayakan vendor dijalankan secara ketat dan independen.

Keempat, terdapat persoalan koordinasi antar lembaga penegakan hukum yang turut memengaruhi kecepatan dan kedalaman proses hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lebih dahulu melakukan penyelidikan awal atas dugaan korupsi MBG, namun karena Kejaksaan Agung lebih dulu menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, KPK memutuskan untuk tidak melanjutkan proses guna menghindari dualisme penanganan perkara. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, pada 8 Juni 2026, menyatakan bahwa KPK telah menyelidiki dugaan ini pada tahap penyelidikan, namun mengakui bahwa proses tidak dapat dilanjutkan secara paralel. Ketua KPK Setyo Budiyo kemudian menyatakan bahwa koordinasi formal dengan Kejaksaan Agung dinilai belum mendesak, dan KPK lebih memilih berfokus pada perbaikan sistem bersama Kepala BGN yang baru. Pembagian kewenangan semacam ini, meskipun secara hukum dapat dibenarkan untuk mencegah tumpang tindih penyidikan, berisiko memunculkan kesan bahwa terdapat ruang bagi lembaga yang lebih cepat bergerak untuk menentukan arah dan kedalaman penyidikan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi seberapa luas jaringan aktor yang akhirnya terjerat hukum.

3.5 Diskusi: Implikasi Kebijakan

Skandal ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis ke depan. Pertama, dari sisi kepercayaan publik, terungkapnya dugaan korupsi pada program yang secara eksplisit ditujukan untuk memenuhi hak gizi anak-anak Indonesia berisiko menimbulkan sinisme publik yang lebih luas terhadap program-program prioritas pemerintah secara umum. Pakar tata kelola publik dari Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, mencatat bahwa program yang dianggap prioritas oleh presiden cenderung memiliki karakter tertutup dan sentralistik, dengan hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, sebuah pola yang menurutnya mempersempit ruang akuntabilitas horizontal. Kedua, dari sisi keberlanjutan anggaran, mengingat skala dana yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahun, skandal ini berpotensi memicu tekanan politik, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun publik secara luas, untuk meninjau ulang kecepatan kenaikan anggaran MBG pada tahun-tahun berikutnya. Ketiga, terdapat risiko politisasi program, baik dalam bentuk penggunaan jaringan distribusi MBG sebagai instrumen patronase politik di tingkat lokal, sebagaimana terindikasi dari temuan afiliasi politik pada sepertiga yayasan mitra, maupun dalam bentuk narasi politik yang menjadikan kasus ini sebagai bahan kontestasi antarkelompok politik menjelang siklus elektoral berikutnya.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa arah reformasi tata kelola pengadaan yang relevan untuk diusulkan. Pertama, perlunya verifikasi pihak ketiga yang

independen terhadap kelayakan mitra yayasan dan vendor, yang tidak hanya mengandalkan proses administratif berbasis portal digital, tetapi juga melibatkan pemeriksaan lapangan oleh pihak yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan jaringan BGN. Kedua, penerapan audit rutin berbasis penilaian risiko atau *risk based audit*, alih-alih audit periodik yang bersifat rutin dan dapat diprediksi, sehingga area dengan risiko penyimpangan tinggi, seperti pengadaan barang bernilai besar dan proses verifikasi mitra baru, mendapat perhatian pengawasan yang lebih intensif. Ketiga, peningkatan transparansi katalog pengadaan, termasuk publikasi daftar mitra yayasan, vendor, dan nilai kontrak secara terbuka kepada publik, sehingga masyarakat sipil dan media dapat melakukan pengawasan silang secara mandiri.

Pada level penguatan akuntabilitas internal, BGN memerlukan unit kepatuhan atau *compliance unit* yang independen dari struktur operasional dan memiliki jalur pelaporan langsung kepada Dewan Pengarah, bukan kepada Kepala BGN yang justru menjadi pihak yang berpotensi terlibat dalam pengambilan keputusan teknis. Selain itu, kebijakan rotasi pejabat kunci pada posisi yang rawan konflik kepentingan, terutama pada fungsi verifikasi mitra dan pengadaan barang, perlu dijalankan secara berkala dan tidak terlalu lama dipegang oleh figur yang sama. Kewajiban pengungkapan konflik kepentingan atau *conflict of interest disclosure* juga perlu diperluas, tidak hanya mencakup hubungan kekerabatan langsung, tetapi juga hubungan afiliasi organisasi, termasuk keterlibatan dalam yayasan atau lembaga nirlaba yang menjadi mitra program.

Terakhir, ruang bagi pengawasan eksternal perlu diperluas dan dilembagakan secara lebih sistematis. Dewan Perwakilan Rakyat, melalui komisi yang relevan, perlu mendapatkan akses informasi yang lebih rutin terhadap kinerja dan temuan audit BGN, tidak hanya pada momen krisis seperti yang terjadi saat ini. Badan Pemeriksa Keuangan perlu didorong untuk melakukan audit kinerja, bukan sekadar audit kepatuhan, terhadap program-program prioritas nasional yang memiliki anggaran besar dan tumbuh cepat. Masyarakat sipil, sebagaimana ditunjukkan oleh peran ICW, *Transparency International Indonesia*, dan koalisi *MBG Watch* dalam kasus ini, telah menunjukkan kapasitas pemantauan yang signifikan, namun kapasitas ini akan lebih efektif apabila didukung oleh keterbukaan data pengadaan secara proaktif dari pihak BGN, bukan semata mengandalkan investigasi reaktif setelah skandal terungkap. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa lembaganya telah memetakan setidaknya empat potensi titik korupsi dalam program MBG sejak 2024, yang mencakup pengadaan dan distribusi bahan makanan, pemalsuan data penerima manfaat, korupsi pengelolaan dana dan anggaran, serta penyimpangan dalam proses pengawasan dan evaluasi, sebuah peringatan dini yang menunjukkan bahwa risiko ini sesungguhnya telah dapat diantisipasi jauh sebelum skandal benar-benar terjadi.

4. KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa dugaan korupsi yang membelit Badan Gizi Nasional dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis pada Juni 2026 bukanlah semata persoalan integritas individu pimpinan lembaga, melainkan cerminan dari kelemahan struktural dalam desain dan institusionalisasi lembaga publik baru yang diberi kewenangan dan anggaran besar secara cepat. Dua klaster utama modus penyimpangan, yaitu manipulasi verifikasi mitra dalam penentuan titik SPPG dan penggelembungan harga dalam pengadaan barang, menunjukkan bahwa kerentanan terjadi baik pada sisi penyaluran manfaat kepada masyarakat maupun pada sisi belanja pengadaan, sehingga reformasi yang dibutuhkan harus bersifat menyeluruh, bukan hanya pada satu titik proses tertentu. Aktor utama dalam kasus ini melibatkan jaringan tiga lapis, yaitu pejabat internal

yang memegang kewenangan persetujuan, vendor yang menyediakan barang dan jasa, serta yayasan afiliasi yang berfungsi sebagai kendaraan formal untuk mengakses dana program. Pola jaringan semacam ini sejalan dengan temuan masyarakat sipil mengenai signifikannya proporsi yayasan mitra yang memiliki afiliasi politik, meskipun afiliasi tersebut tidak otomatis berarti pelanggaran hukum. Dari sisi dampak, meskipun pemerintah menegaskan program tetap berjalan, skandal ini berpotensi menggerus kepercayaan publik dan memicu tekanan politik terhadap keberlanjutan anggaran besar program di masa depan, sebagaimana ditunjukkan oleh tuntutan moratorium dan audit total dari koalisi masyarakat sipil.

5. DAFTAR PUSTAKA

- AFU.id. (2026, 23 Juni). Kasus korupsi MBG, Kejaksaan perpanjang penahanan Dadan Hindayana cs. <https://afu.id/hukum-kriminal/kasus-korupsi-mbg-kejakung-perpanjang-penahanan-dadan-hindayana-cs>
- AsiaToday.id. (2026, 19 Juni). Indonesia's US\$22 billion free school meals program hit by expanding corruption probe. <https://asiatoday.id/read/indonesias-us22-billion-free-school-meals-program-hit-by-expanding-corruption-probe>
- Bisnis.com. (2026, 5 Juni). Kronologi lengkap kasus Dadan cs eks Kepala BGN jadi tersangka korupsi MBG. <https://kabar24.bisnis.com/read/20260605/15/1978416/kronologi-lengkap-kasus-dadan-cs-eks-kepala-bgn-jadi-tersangka-korupsi-mbg>
- Bloomberg Technoz. (2026, 3 Juni). Usai dicopot, Dadan Hindayana jadi tersangka korupsi BGN. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/110776/usai-dicopot-dadan-hindayana-jadi-tersangka-korupsi-bgn>
- CNBC Indonesia. (2026, 19 Juni). Glory Sihombing, tersangka keenam dalam korupsi Makan Bergizi Gratis. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260619085133-4-743932/glory-sihombing-tersangka-keenam-dalam-korupsi-makan-bergizi-gratis>
- CNN Indonesia. (2026, 4 Juni). Fakta-fakta kasus korupsi MBG eks Kepala BGN Dadan cs. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260604061723-12-1365128/fakta-fakta-kasus-korupsi-mbg-eks-kepala-bgn-dadan-cs>
- Detik.com. (2026a, 3 Juni). Hal-hal yang bikin Dadan Hindayana dkk jadi tersangka. <https://news.detik.com/berita/d-8517020/hal-hal-yang-bikin-dadan-hindayana-dkk-jadi-tersangka>
- Detik.com. (2026b, 12 Juni). Cara licik Andri Mulyono jadi vendor motor listrik BGN meski tak punya dealer. <https://news.detik.com/berita/d-8530363/cara-licik-andri-mulyono-jadi-vendor-motor-listrik-bgn-meski-tak-punya-dealer>
- Detik.com. (2026c, 12 Juni). Benang merah dua klaster korupsi di BGN: jual beli SPPG dan markup barang. <https://news.detik.com/berita/d-8529908/benang-merah-2-klaster-korupsi-di-bgn-jual-beli-sppg-dan-markup-barang>
- Detik.com. (2026d, 18 Juni). Dugaan rasuah MBG, ini sosok dan peran kelima tersangka. <https://news.detik.com/berita/d-8531965/dugaan-rasuah-mbg-ini-sosok-dan-peran-kelima-tersangka>
- Detik.com. (2026e, 2 Juni). Prabowo copot Kepala BGN Dadan Hindayana! <https://news.detik.com/berita/d-8515190/prabowo-copot-kepala-bgn-dadan-hindayana>
- IDN Times. (2026a). Sony Sonjaya terima uang jual beli titik SPPG dari Asep Yusuf. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/sony-sonjaya-terima-uang-jual-beli-titik-sppg-dari-asep-yusuf-00-vdzm7-1xf66z>

- IDN Times. (2026b). Kejagung dalam besaran uang setoran hasil jual beli titik SPPG ke Sony. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kejagung-dalam-besaran-uang-setoran-hasil-jual-beli-titik-sppg-ke-sony-00-vdzm7-1b15l9>
- Indonesia Satu. (2026). Kejagung tetapkan tersangka baru kasus korupsi MBG di BGN. <https://indonesiasatu.co/detail/kejagung-tetapkan-tersangka-baru-kasus-korupsi-mbg-di-bgn>
- Indonesian Corruption Watch. (2025). Ada siapa di balik MBG: Politik patronase untuk memperkuat dukungan. Indonesian Corruption Watch.
- Jurnas.com. (2026, 17 Juni). KPK akui sudah koordinasi dengan BPKP terkait penyelidikan korupsi MBG. <https://www.jurnas.com/artikel/1660453/kpk-akui-sudah-koordinasi-dengan-bpkp-terkait-penyelidikan-korupsi-mbg/>
- Kompas.com. (2026a, 2 Juni). Breaking news: Prabowo copot Kepala BGN Dadan Hindayana. <https://nasional.kompas.com/read/2026/06/02/20424351/breaking-news-prabowo-copot-kepala-bgn-dadan-hindayana>
- Kompas.com. (2026b, 8 Juni). Ketika gizi dikelola dengan cek kosong kekuasaan. <https://nasional.kompas.com/read/2026/06/08/15500091/ketika-gizi-dikelola-dengan-cek-kosong-kekuasaan>
- Kompas.id. (2026). Bagaimana modus korupsi bekas Kepala BGN dan dua wakilnya? <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-modus-korupsi-bekas-kepala-bgn-dan-dua-wakilnya>
- Media Indonesia. (2026). Nilai kerugian negara kasus korupsi MBG masih dihitung Kejagung. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/896594/nilai-kerugian-negara-kasus-korupsi-mbg-masih-dihitung-kejagung>
- Niaga.Asia. (2026). KPK akui sudah koordinasi dengan BPKP terkait penyelidikan korupsi MBG. <https://www.niaga.asia/kpk-akui-sudah-koordinasi-dengan-bpkp-terkait-penyelidikan-korupsi-mbg/>
- Nyaring Indonesia. (2026). Dugaan korupsi MBG kian menggunung, muncul tuduhan CCTV fiktif Rp300 miliar. <https://nyaringindonesia.com/dugaan-korupsi-mbg-kian-menggunung-muncul-tuduhan-cctv-fiktif-rp300-miliar/>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024). Inilah Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. <https://setkab.go.id/inilah-perpres-83-tahun-2024-tentang-badan-gizi-nasional/>
- Suara.com. (2026, 3 Juni). Jadi tersangka korupsi MBG, berapa harta kekayaan Dadan Hindayana? <https://amp.suara.com/news/2026/06/03/192018/jadi-tersangka-korupsi-mbg-berapa-harta-kekayaan-dadan-hindayana>
- Tempo.co. (2026a). Jaksa geledah kantor Badan Gizi Nasional. <https://www.tempo.co/hukum/jaksa-geledah-kantor-badan-gizi-nasional-2215182>
- Tempo.co. (2026b, 10 Juni). MBG Watch segel gedung BGN, mendesak MBG dihentikan. <https://nasional.tempo.co/read/2107786/mbg-watch-segel-gedung-bgn-mendesak-mbg-dihentikan>
- Tempo.co. (2026c). Koalisi sipil ancam demo lebih besar di kantor BGN. <https://www.tempo.co/politik/koalisi-sipil-ancam-demo-lebih-besar-di-kantor-bgn-2268401>

- Tempo.co. (2026d, 17 Juni). KPK punya materi berbeda dengan kejaksan soal kasus MBG.
<https://www.tempo.co/hukum/kpk-punya-materi-berbeda-dengan-kejaksan-soal-kasus-mbg-2270375>
- Tribunnews.com. (2026). Sosok Asep Yusuf Somantri, tersangka baru kasus MBG, setor uang ke Sony manipulasi titik SPPG.
<https://bangka.tribunnews.com/news/1686846/sosok-asep-yusuf-somantri-tersangka-baru-kasus-mbg-setor-uang-ke-sonymanipulasi-titik-sppg?page=2>
- Wikipedia bahasa Indonesia. (2026). Kasus korupsi Badan Gizi Nasional.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Korupsi_Badan_Gizi_Nasional